

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya adalah sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan menjadi fokus dan perhatian yang utama oleh pemerintah Indonesia, mengingat besarnya potensi sumber daya tersebut. Sektor perikanan dianggap sebagai sektor yang mampu bertahan dalam situasi krisis dan memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Bahkan, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah Indonesia memberikan fokus yang besar pada sektor ini dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. (www.bpkp.go.id)

Salah satu jenis sumber daya ikan yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah ikan Tuna. Terdapat empat jenis ikan tuna yang ada di Indonesia diantaranya ikan tuna sirip kuning, ikan tuna sirip biru, ikan tuna mata besar, ikan tuna albakor dan skipjack tuna. Berdasarkan data dari FAO pada tahun 2016 Indonesia menyumbang hamper 16% atau 1,1 juta ton dari total sekitar 7,7 juta metric ton tuna. Ikan tuna merupakan ikan yang memiliki cara hidup berpindah-pindah tempat, sehingga diperlukan penanganan dan pengelolaan yang cakap agar keberlangsungan hidup ikan tuna tetap terjaga.

Ikan Tuna merupakan perikanan terbesar ketiga di Indonesia setelah udang dan ikan dasar. Penyebaran ikan tuna di perairan barat Indonesia sangat melimpah di Samudera Hindia. Ikan tuna menjadi primadona dengan nilai ekonomi yang tinggi. Ikan tuna bagi Indonesia sangat penting karena merupakan komoditas perikanan unggulan dan Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna global. Selain memiliki harga yang relatif mahal apabila dibandingkan dengan harga komoditas perikanan lainnya, permintaan pasar untuk komoditi tuna terus meningkat dan menyatakan komoditas tuna sebagai proyek percontohan industrialisasi perikanan tangkap, alasannya bahwa industrialisasi perikanan tuna sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mendukung pasokan industry domestik serta memperkuat pasar internasional. (Perikanan, 2017).

Konstelasi politik internasional berkembang sangat dinamis. Berbagai isu yang berkembang dalam tatanan masyarakat internasional mencakup berbagai aktor, dimensi dan bentuk interaksi internasional yang beragam. Bentuk kerjasama internasional antar negara juga sangat beragam. Tidak hanya kerjasama bilateral (dua negara) dan kerjasama multilateral yang melibatkan berbagai negara kawasan (regionalisme), dengan melintasi kawasan yang memiliki kepentingan nasional yang sepeham bergabung dalam satu organisasi internasional.

beberapa organisasi yang mengelola kerjasama kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan mendorong terbentuknya organisasi perikanan regional yang lebih dikenal dengan istilah Regional Fisheries Management Organization (RFMO). Salah satu contoh RFMO adalah North Atlantic Fisheries Organization (NAFO) yang merupakan institusi kerjasama perikanan antara Kanada dan Amerika Serikat.

Bagi ikan-ikan yang bermigrasi jauh seperti tuna, organisasi semacam itu mencakup daerah yang lebih luas dan melibatkan banyak negara. Misalnya, untuk perikanan tuna di Samudera Atlantik terdapat ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) di samping negara-negara yang berbatasan dengan Samudera Atlantik, dua negara lain yaitu Jepang dan Korea Selatan juga sebagai anggota karena armadanya ikut menangkap ikan tuna di sana. Sementara itu di samudera Pasifik kawasan timur terdapat IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission) yang memiliki anggota terdiri atas Amerika Serikat (United States of America) dan beberapa negara Amerika Latin yang menangkap ikan di sana termasuk anggotanya. Di samudera Pasifik kawasan tengah dan barat yang berbatasan langsung dengan Indonesia, negara-negara di daerah ini sepakat untuk membentuk Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC). Begitu juga dengan kawasan samudera Hindia, dimana Indonesia terlibat di dalamnya, yaitu IOTC (Indian Ocean Tuna Commission).

Sejak diterbitkannya Perpres No.9 Tahun 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Komisi Tuna Samudra Hindia, dan pelaksanaan sidang tahunan IOTC ke-11 pada tanggal 13-18 Mei 2007 di Mauritius, Indonesia resmi menjadi anggota IOTC yang ke 27. Bergabungnya Indonesia di organisasi ini tentu dilakukan setelah melihat peluang manfaat yang akan muncul dari keanggotaan di IOTC. Selain itu, desakan dari pengusaha sebagai pelaku utama perikanan tuna

yang menuntut pemerintah untuk menyegerakan peresmian Indonesia menjadi anggota tetap IOTC.

Fakta bahwa Indonesia tidak dapat mengekspor ikan Tuna hasil tangkapan para nelayan di pasar internasional yang disebabkan oleh pemberlakuan sanksi perdagangan sejak tanggal 1 Juli 2004 menjadi perhatian Indonesia sebagai negara penghasil. Sanksi tersebut disebabkan oleh RFMO memberlakukan aturan Trade Related Measures dan berimplikasi kepada negara yang harusnya tergabung ke dalam sebuah organisasi internasional seperti IOTC harus patuh terhadap klausul yang menjadi aturan.

Keikutsertaan Indonesia di IOTC juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berperan secara aktif dalam kerjasama dengan negara-negara lain melaksanakan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya ikan, khususnya tuna di laut lepas Samudera Hindia. Sebagai salah satu RFMO (Regional Fisheries Management Organization), yaitu organisasi pengelolaan perikanan regional di bawah FAO, IOTC diberi mandat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya ikan tuna di wilayah laut lepas Samudera Hindia.

Kebijakan Indonesia menjadi anggota IOTC didasari adanya keinginan mendorong pengelolaan konservasi dan pemanfaatan optimum persediaan ikan tuna, sebagai upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai bentuk tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan Tuna yang diterapkan IOTC di atas membuat Indonesia tidak bisa mengekspor produk ikan Tuna yang telah ditangkap dari kawasan perairan Indonesia karena tidak bergabung kedalam IOTC, padahal disisi yang lain potensi hasil produksi penangkapan ikan Tuna Indonesia sangat berlimpah.

Organisasi regional dan internasional ini ada untuk mengatasi permasalahan antar negara yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya Ikan yang kurang optimal. Diharapkan organisasi ini bisa mengelola dan mengatur kebijakan perikanan regional seperti pembatasan jumlah tangkapan atau kuota kepada negara-negara anggota produsen tuna di wilayah penangkapan ikan tuna. Manfaat bergabungnya Indonesia di IOTC dapat dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Manfaat dari segi politik, memperkuat posisi kepada dunia bahwa Indonesia adalah *major fishing player* berbasis *sustainable fisheries development*. Segi sosial, nelayan *high seas* Indonesia lebih dapat diterima di negara lain karena

merepresentasikan negara yang bertanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan. Ditinjau dari sisi budaya, kita membangun budaya *outward looking* di *high seas*.

Industri perikanan saat ini sangat efisien dan menguntungkan, tetapi masalah-masalah perikanan seperti *overfishing* dan *illegal fishing* masih kerap terjadi dan sulit untuk dihilangkan walaupun sudah ada berbagai upaya-upaya untuk menghentikan masalah tersebut. Eksploitasi yang intens sebenarnya tidak dimulai pada era modern saja atau bahkan saat awal masa industrialisasi, namun pada abad pertengahan ke sebelas di Eropa. Pada abad sebelas dan seterusnya penangkapan berlebihan telah menyebabkan kerusakan ekosistem lokal dan regional, mengakibatkan penurunan stok ikan dan mamalia ikan secara signifikan. (Roberts, *The Unnatural History of the Sea*, 2009)

Dilihat dari eksplorasi besar-besaran di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terjadi dampak signifikan. Dari data yang dikeluarkan oleh IOTC, penangkapan tuna di hampir seluruh wilayah perairan Indonesia sudah dinyatakan melebihi batas *overfishing* dan itu sudah berjalan dari tahun 2010. Jenis tuna yang ada di Indonesia, yakni sirip kuning dan sirip biru selatan dinyatakan bisa punah dalam waktu 3 hingga 10 tahun jika tidak segera dilakukan pembatasan penangkapan. Ancaman kepunahan juga dihadapi oleh tuna jenis lain, seperti cakalang dan mata besar yang terancam keberadaannya. Turunnya populasi ikan tuna di Indonesia disebabkan oleh pengelolaan alat dan cara tangkap yang tidak baik, dan sistem distribusi ikan tuna di pasar Indonesia yang tidak jelas. Dengan ketidakjelasan distribusi pasar tersebut peluang terjadinya penggunaan tangkapan tuna ilegal atau tuna laundering akan sangat besar. (Ambari, 2017)

Terus menurunnya populasi tuna di Indonesia salah satunya juga disebabkan oleh maraknya kapal ikan asing yang melakukan penangkapan secara ilegal, serta perusahaan dan nelayan yang menangkap dan menjual tuna secara besar sehingga dapat mengancam kedaulatan negara. Bertambah populasi manusia meningkatkan juga kebutuhan pangan sementara sumber ikan terbatas.

Dari beberapa jenis Ikan yang dikelola IOTC, beberapa ikan tuna masuk dalam kategori terancam punah. Maka ancaman atau potensi kelangkaan tuna harus kita cermati bersama. Di luar langkah kebijakan formal, diperlukan kesadaran dan kepedulian terhadap konsumsi tuna tetap agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan (*sustainable*). Artinya sumber daya ikan

tuna yang ada saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia dimasa mendatang.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang dari penelitian ini penulis merasa perlu untuk membedah masalah eksploitasi ikan tuna dan upaya menguranginya ke suatu studi. Masalah ikan tuna dipilih karena ikan tuna merupakan spesies penting dan komoditas utama perikanan Indonesia yang populasinya terancam akibat penangkapan yang berlebihan. Maka dari itu muncul pertanyaan penelitian, **“Bagaimana Kerjasama Indonesia dengan IOTC dalam Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia Periode 2014-2017”**

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini dan untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang di angkat, maka diperlukan suatu batasan dalam membahas permasalahan yang dikemukakan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya memfokuskan daerah Samudera Hindia untuk menjawab rumusan masalah diatas.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji kerjasama IOTC sebagai organisasi internasional yang mempunyai misi untuk melindungi populasi Ikan Tuna dalam menanggulangi masalah Menurunnya Ketersedian Ikan Tuna di Indonesia.
- b. Untuk melihat efektifitas kerjasama Indonesia dengan IOTC dalam menanggulangi masalah Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia.
- c. Untuk menganalisa tantangan dan peluang IOTC dalam menanggulangi Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan bahan yang diteliti, khususnya peran organisasi Internasional (IOTC) dalam masalah Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia

b. Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran IOTC dalam Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia
2. Dapat dijadikan informasi bagi pihak terkait dengan masalah yang teliti serta bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai peran IOTC dalam Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia.

I.5 Sistematika Penulisan

Penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang di sesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab II, penulis akan membahas mengenai literature review, kerangka pemikiran yang terdiri dari teori-teori dan konseptual, alur pemikiran dan asumsi/hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab III, penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia

Pada bab IV, penulis akan menjelaskan tentang kondisi dan fenomena yang terjadi mengenai Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia dan Potensi Ikan Tuna di Perairan Indonesia.

BAB V Kerja Sama Indian Ocean Tuna Commision (IOTC) dalam Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia Periode 2014-2017

Pada bab V, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum IOTC, kerja sama IOTC di Indonesia, menganalisa kerja sama IOTC dalam masalah Pengelolaan Ikan Tuna di Perairan Indonesia, kemudia membahas mengenai tantangan dan peluang yang di hadapi IOTC dalam menangani penanggulangan masalah Pengelolaan Ikan Tuna di Indonesia.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab VI, berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masuka terkait akan permasalahan yang di angkat oleh penulis.